

**PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
KETAHANAN PANGAN MELALUI PROGRAM LUMBUNG
PANGAN MASYARAKAT
(STUDI KELOMPOK WANITA TANI GUYUP RUKUN PEKON
SUKOHARJO II KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN
PRINGSEWU).**

Nurarifah^a, Rahayu Sulistiowati^b, dan Nana Mulyana^c
^{abc}*Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Lampung*
korespondensi: arifahnur06@gmail.com

Abstract

Good governance is defined as a process of good governance by involving stakeholders, various economic activities, social politics, and the use of various natural, financial and human resources for the interests of the people carried out by adhering to the principles of justice, equity, equality, efficiency, transparency and accountability. To realize good governance, it is necessary to apply the principles of good governance in every implementation of government programs. This includes the community food storage program as a development program. This study aims to describe the application of the principles of good governance by the Pringsewu Regency Food Security Service in the development of food security. Furthermore, this research uses the principles of good governance according to Sedarmayanti, which consists of accountability, transparency, participation and the rule of law. The type of research used in this study is descriptive type with a qualitative approach. Data collection techniques are observation, interviews and documentation relating to the focus of research. The results of this study illustrate that the principles of good governance have been successfully implemented in the food storage program, but this has not been maximized because there is one domain that has not yet been achieved, namely the private sector because there is no opportunity to establish cooperation with the private sector.

Keywords: Good Governance, Food Security, Food Barn Program, Farmer Women Group

Abstrak

Good governance diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik dengan melibatkan *stakeholder*, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik, dan pemanfaatan beragam sumber daya alam, keuangan dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada setiap pelaksanaan program pemerintah. Termasuk dalam hal ini yaitu program lumbung pangan masyarakat sebagai program pembangunan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip *good governance* oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu dalam pembangunan ketahanan pangan. Selanjutnya penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip *good governance* menurut Sedarmayanti yaitu terdiri dari akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan supremasi hukum. Tipe penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa prinsip-prinsip *good governance* sudah berhasil dijalankan dalam program lumbung pangan, namun hal tersebut belum maksimal dikarenakan terdapat satu domain yang belum tercapai yaitu sektor swasta dikarenakan belum ada kesempatan untuk menjalin kerjasama dengan pihak swasta.

Kata kunci : *Good Governance*, Ketahanan Pangan, Program Lumbung Pangan, Kelompok Wanita Tani

PENDAHULUAN

Good governance merupakan suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan *stakeholder* terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumberdaya seperti sumber daya alam, keuangan dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Konsep *good governance* menurut Sedarmayanti (2012:2) merupakan konsep yang diperkenalkan sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan mencakup tiga domain yaitu *state* (pemerintahan/negara), *privat sector* (sektor swasta/dunia usaha), dan *society* (masyarakat). Dalam menuju *good governance* pemerintah diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih efisien, efektif serta demokratis bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap pada aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur pada persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar.

Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2012, jumlah penduduk provinsi Lampung berjumlah 7.835.308 juta jiwa. Mengalami peningkatan pada tahun 2013 sehingga jumlahnya menjadi 7.932.132 jiwa. Peningkatan terus terjadi pada setiap tahunnya, pada tahun 2014 jumlah penduduk sebanyak 8.026.191 jiwa, 8.117.268 jiwa pada tahun 2015, dan 8.205.141 jiwa pada tahun 2016 (<https://lampung.bps.go.id/> diakses pada 19 Desember 2018).

Pertumbuhan penduduk setiap tahunnya, mengakibatkan jumlah penduduk semakin besar sehingga dibutuhkan juga pangan yang mencukupi bagi seluruh masyarakat. Dengan kondisi dan permasalahan tersebut pemerintah membuat program untuk menjamin ketahanan pangan masyarakat yaitu dibentuknya Lumbung Pangan Masyarakat. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pangan yang menyatakan bahwa Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, sementara masyarakat menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan, perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli mereka.

Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, yang menyatakan bahwa penyediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu melalui pengembangan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal, pengembangan efisiensi sistem usaha pangan, pengembangan teknologi produksi pangan, pengembangan sarana dan prasarana produksi pangan, mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.

Lumbung pangan masyarakat merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan dengan sistem tunda jual, penyimpanan, pendistribusian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang dikelola secara berkelompok. (Soemarmo. "Model Pengembangan LPMD Lumbung Pangan Masyarakat Desa. Malang: FP Universitas Brawijaya, 2010. Diakses dari <http://marno.lecture.ub.ac.id/>. Pada 19 Februari 2018)

Provinsi Lampung merupakan salah satu lumbung pangan nasional dengan dukungan semua pihak baik pemerintah pusat, Kabupaten atau Kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, stakeholder, penyuluh pertanian, swasta, dan lembaga sosial masyarakat. (Muchjidin Rachmat dkk, "Lumbung Pangan Masyarakat: keberadaan dan perannya dalam penanggulangan kerawanan pangan", diakses dari <http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/fae/article/view/3903>, pada tanggal 14 Juli 2018 pukul 13.58).

Kabupaten Pringsewu memiliki luas panen padi sawah yang cukup luas, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Pringsewu memberikan program lumbung pangan. Menurut Ketua Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu melalui rencana jangka menengah tahun 2018-2022 bahwa setiap desa difasilitasi satu ton dan satu lumbung pangan untuk satu desa.

Pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat, sehingga kebutuhan akan pangan dan ketahanan pangan menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk mengelola, salah satunya dengan membentuk lumbung pangan masyarakat. Lumbung pangan ini berfungsi untuk menjaga stok pangan pada tingkat masyarakat. Lumbung pangan merupakan sebuah program pemerintah yang di bentuk untuk mensejahterakan pangan bagi masyarakat. Jadi keberhasilan lumbung pangan merupakan keberhasilan *good governance* juga, sehingga pencapaian lumbung pangan bisa mengukur pencapaian *good governance*.

Nurarifah,
Sulistiwati,
Mulyana: Prinsip
Good Governance
dalam Rangka
Pembangunan
Ketahanan...

Mencapai *good governance* dalam program lumbung pangan masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan supremasi hukum. Penerapan prinsip *good governance* juga harus melibatkan tiga domain yaitu pemerintah (*governance*), swasta (*privat*), dan masyarakat (*civil society*) untuk saling mendukung dalam mensejahterakan pangan bagi masyarakat, serta berperan aktif dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan program dan pembangunan ketahanan pangan yang sedang dilaksanakan.

Penerapan prinsip *good governance* dalam rangka pembangunan ketahanan pangan di Pekon Sukoharjo II dianalisis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2009:289) yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum.

METODE

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam rangka pembangunan ketahanan pangan melalui program lumbung pangan masyarakat pada Kelompok Wanita Tani Guyup Rukun Pekon Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

Fokus masalah pada penelitian ini adalah pelaksanaan prinsip *good governance* dalam sebuah program oleh Dinas Ketahanan Pangan yang diukur dengan menggunakan teori prinsip *good governance* menurut Sedarmayanti (2009:289) yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan supremasi hukum.

Lokasi yang dijadikan penelitian ini yaitu di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu dan di Pekon Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta menggunakan keabsahan data yang diperiksa dengan menggunakan metode triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Good Governance

Hasil dan pembahasan penelitian mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam bidang pembangunan ketahanan pangan. Analisis penelitian ini menggunakan data-data yang telah diperoleh dan diolah oleh peneliti melalui teknik wawancara, dokumentasi dan observasi peneliti.

1. Akuntabilitas. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu sudah melakukan prinsip akuntabilitas kepada masyarakat Pekon Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. Bentuk akuntabilitasnya yaitu dengan memberikan pelayanan seperti pelatihan-pelatihan kemampuan masyarakat untuk menambah wawasan dan bantuan dalam bentuk fasilitasi yaitu gabah kering giling, timbangan dan alat pengukur kadar air yang terkandung di dalam padi. Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti menarik kesimpulan mengenai penerapan prinsip *good governance* yaitu tentang akuntabilitas bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu sudah melakukan salah satu prinsip *good governance* yaitu prinsip akuntabilitas yaitu dengan dibentuknya lumbung pangan masyarakat dan diberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas, pengetahuan dan pelatihan untuk pengembangan lumbung pangan tersebut. Dinas Ketahanan Pangan juga selalu memonitoring setiap lumbung pangan yang sudah diberikan bantuan yang diurus oleh kelompok wanita tani yaitu setiap enam bulan sekali untuk mengontrol apakah ada perkembangan yang ada pada lumbung pangan yang mereka jalankan.
2. Transparansi. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu sudah melakukan prinsip *good governance* yaitu transparansi. Transparansi diberikan kepada masyarakat pada saat dilakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat, yaitu Dinas Ketahanan Pangan memberitahu langsung kepada masyarakat besaran bantuan yang akan diterima, dana yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu, kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan hasil dari kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di atas, bentuk transparansi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan kepada masyarakat terkait dengan kinerja dan kegiatan dilakukan oleh

Dinas Ketahanan Pangan yaitu setiap kali ada pertemuan untuk membahas program lumbung pangan masyarakat. Mereka melakukan rapat koordinasi dengan kelompok tani di setiap kecamatan terdapat perwakilan tersendiri seperti dari ketua gapoktan, ketua kelompok wanita tani dan kepala pekon.

3. Partisipasi. Berdasarkan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu sudah melakukan prinsip partisipasi dalam program lumbung pangan masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu.
Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* yaitu partisipasi sudah dilakukan dengan baik. Yaitu dengan adanya partisipasi masyarakat yang semakin banyak dalam mengikuti program lumbung pangan ini.
4. Supremasi Hukum. Dari hasil wawancara Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan program yang menjadi tanggungjawab mereka yaitu program lumbung pangan masyarakat berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
Supremasi hukum merupakan salah satu prinsip *good governance* seperti yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan yaitu melaksanakan program lumbung pangan sesuai dengan peraturan yang ada di Undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. Dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan Dinas Ketahanan Pangan membentuk salah satu fasilitas dana bantuan sosial yaitu lumbung pangan masyarakat.

Nurarifah,
Sulistiwati,
Mulyana: Prinsip
Good Governance
dalam Rangka
Pembangunan
Ketahanan...

92

Faktor Pendukung

1. Masyarakat Yang Dinamis
Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masyarakat Pekon Sukoharjo II tidak menutup diri akan perubahan yang ada, mereka sangat antusias dalam menjalankan program yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu. Program ini sangat membantu kebutuhan pangan keluarga mereka pada saat mengalami paceklik saat menunggu panen maupun ketika panen mereka gagal.

Masyarakat Pekon Sukoharjo II tidak menutup diri mereka dari menerima saran, nasihat yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan maupun pendamping kelompok wanita tani dan selalu berkomunikasi dengan anggota dan pengurus.

2. Lingkungan Yang Mendukung
Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa lingkungan berperan dalam mendukung kesuksesan suatu program, seperti sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya itu sendiri. Selain lingkungan mereka juga diberikan wewenang dan kebebasan dalam mengatur lumbung pangan ini agar mereka dapat mengambil tindakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang ada pada lumbung pangannya. Dinas Ketahanan Pangan juga tidak terlepas diri mereka juga akan membantu dalam hal pelatihan-pelatihan maupun bila ada masalah dalam program tersebut.

Sumberdaya yang ada di Pekon Sukoharjo II baik sumber daya alam yang sudah memadai maupun sumberdaya manusia bisa dibimbing dan diajak bekerjasama dalam melaksanakan program lumbung pangan dan membantu mewujudkan *good governance*. Selain itu mereka juga diberikan wewenang dan kebebasan dalam mengatur lumbung pangan ini agar mereka dapat mengambil tindakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang ada pada lumbung pangan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian penerapan prinsip *good governance* dalam rangka pembangunan ketahanan pangan melalui program lumbung pangan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip-prinsip *Good Governancedalam* rangka pembangunan ketahanan pangan melalui program lumbung pangan masyarakat pada realitanya dapat dikatakan belum maksimal, karena salah satu domain yang belum tercapai yaitu *privat sector* (sektor swasta). Prinsip-prinsip *good governance* sudah berhasil dijalankan, seperti akuntabilitas Dinas Ketahanan Pangan dalam melayani masyarakat, transparansi yang dilakukan tentang program, peningkatan partisipasi masyarakat, dan landasan hukum yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan.
2. Faktor yang menjadi pendukung dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam rangka pembangunan ketahanan pangan melalui program lumbung pangan masyarakat pada Kelompok Wanita Tani Guyup Rukun Pekon Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu adalah pertama masyarakat yang dinamis yaitu mereka tidak menutup diri dan ingin mengubah kehidupan menjadi lebih baik, dan yang kedua lingkungan yang mendukung seperti sumber daya manusianya maupun sumber daya alam Pekon Sukoharjo II.

Berdasarkan kesimpulan dan penjelasan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pendamping Kelompok Wanita Tani membuat pelatihan-pelatihan yang lebih beragam agar masyarakat menjadi lebih termotivasi untuk ikut kegiatan program lumbung pangan dan meningkatkan potensi masyarakat.
2. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu dan KWT Pekon Sukoharjo II perlu memperluas dan menjalin kerjasama dengan organisasi maupun lembaga luar yaitu pihak swasta agar peningkatan kesejahteraan masyarakat semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance “kepemerintahan yang baik” & Good Corporate Governance “tata kelola perusahaan yang baik”*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- _____. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*. Bandung: Refika Aditama.
- Soemarmo. 2010. *Model Pengembangan LPMD Lumbung Pangan Masyarakat Desa*. FP Universitas Brawijaya. Malang. <http://marno.lecture.ub.ac.id/>. [27 Oktober 2015].
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Katahanan Pangan
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- <http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/fae/article/view/3903>, diakses pada 14 Juli 2018
- <http://lampungpro.com/post/8874/menjuju-lumbung-pangan-dunia-2045-pemprov-lampung-bentuk-protani>”, diakses pada 14 Juli 2018
- “Kabupaten Pringsewu dalam Angka 2013-2017” <https://pringsewukab.bps.go.id> diakses pada 17 Juli 2018
- “Jumlah penduduk provinsi lampung 5 tahun terakhir” <https://lampung.bps.go.id/> diakses pada 19 Desember 2018

